

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak Negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi merupakan indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. Konsep ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.¹²

¹² Miriam Budiardjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, Penerbit Gramedia, Jakarta 1993

Pemerintahan demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan di bawah kuasa mengubah hukum dan struktur pemerintahan atas kehendak warganegara. Keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang bertindak melalui pendapat masyarakat, yang dilakukan melalui pemilihan dan penegakan hukum. Keputusan yang dibuat melalui pemilihan diambil tidak oleh seluruh warga negara, namun oleh warga yang melakukan pemilihan. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara biasanya diijinkan untuk memilih. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak memilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, biasanya 18 tahun. beberapa negara juga tidak memperbolehkan beberapa kategori manusia (misalnya, narapidana atau bekas narapidana).

B. Partai Politik

1. Definisi Partai

Istilah "partai politik" dalam pengertiannya yang sekarang tercipta pada abad ke-19 bersamaan dengan terbentuknya demokrasi barat, dan dilaksanakannya hak pilih menyeluruh di Eropa dan Amerika Serikat. Namun fenomena semacam ini bukan baru muncul akhir-akhir ini saja. Pada zaman negara kota dahulu hingga abad pertengahan, berbagai perwakilan oligarkis dan perwakilan yang berdasarkan kedudukan, telah memperebutkan kekuasaan dan pengaruh.

Partai politik merupakan kelompok orang-orang berpendirian sama, yang mencari kekuasaan dan pengaruh di tingkat pemerintahan, untuk dapat mempengaruhi pembentukan kehendak/tujuan dan mewujudkan pandangan politik bersama. Definisi partai sangat dipengaruhi oleh pengertian masyarakat. Dalam

masyarakat pluralisme, terutama dalam konstitusi berorientasikan parlemen, keragaman kepentingan ini menjadi dasar pembentukan partai. Paham Marxisme-Leninisme mendefinisikan partai sebagai organisasi politik, di mana di dalamnya berbagai kelas bergabung untuk dapat mewujudkan kepentingan tertentu yang dimiliki oleh kelompoknya. Menurut Max Weber, dalam suatu masyarakat yang modern, pimpinan politik dan pembentukan tujuan politik tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya partai. Partai-partai ini mengambil alih pengalihan (transmisi) proses pengambilan keputusan antara masyarakat dan pemerintah.¹³

Dalam teori Ilmu Politik dijumpai banyak sekali definisi partai politik, di mana masing-masing definisi pada hakikatnya memiliki banyak kesamaan, meskipun satu di antaranya juga ada yang saling bertentangan. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil beberapa pendapat ahli politik yang banyak diikuti oleh ahli-ahli politik dewasa ini, yakni Carl Freiderich, R.H Soltau dan Sigmund Neumann.

a. Carl Freiderich menyatakan, partai politik merupakan kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya.

b. R.H.Soltau mengemukakan partai politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

¹³ Peter Schroder, "Strategi Politik", Friedrich-Naumann Stiftung, Jakarta, 2005

c. Sigmund Neumann mengemukakan partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹⁴

Dari banyak ahli politik yang memberikan definisi, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota masyarakat yang terorganisasikan secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.31/2003 tentang Partai Politik, yang dimaksud partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warganegara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.

Dalam sistem demokrasi-parlementer yang berlaku adalah dasar pembentukan partai bebas. Sesuai dengan tuntutan historis ataupun tuntutan masyarakat, terbentuklah berbagai sistem partai. Dengan demikian, seringkali ada dua partai besar yang saling berhadapan, seperti misalnya di Amerika Serikat ataupun Inggris, namun bisa juga berbagai partai dalam jumlah yang banyak seperti di Amerika Latin. Di samping itu ada pula sejumlah partai kecil, namun situasi yang ada pada umumnya didominasi oleh dua partai besar.

Sebagai kebalikan dari sistem multi partai, di dalam sistem beberapa partai, jumlah partai yang benar-benar memiliki pengaruh terhadap sistem pemerintahan

¹⁴ Trubus Rahardiansah, “ *Pengantar Ilmu Politik*”, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2006

dibatasi. Penampakan sistem partai semacam ini sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan sistem pemilu yang berlaku. Sementara sistem pemilu distrik mendukung sistem dua partai, sistem proporsional mendukung pemunculan berbagai partai kecil, sejauh klausul larangan atau ketentuan pembatas tidak berhasil mendukung sistem multi-partai.

2. Fungsi Partai Politik

Dalam Ilmu Politik fungsi Partai Politik sangat beragam, yang secara keseluruhan dapat dirangkum, sebagai berikut¹⁵:

- a) Sosialisasi politik. Partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi politik.
- b) Partisipasi politik. Mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas dari partai politik.
- c) Rekrutmen politik. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai
- d) Komunikasi politik. Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
- e) Artikulasi kepentingan. Menyatakan atau mengartikulasi kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-

¹⁵ *Op.cit*

kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

- f) Agregasi kepentingan. Merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah.
- g) Pembuat kebijakan. Suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Setelah memperoleh kekuasaan (eksekutif dan legislatif), maka dia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijakan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

C. Sistem Kepartaian

Kajian teoritis tentang sistem kepartaian mengacu pada aspek tipologi numerik (*numerical typology*), yaitu sejumlah partai yang dianutnya. Studi klasik yang dilakukan oleh Duverger, misalnya, memperlihatkan hal tersebut (jumlah partai) yang membagi sistem kepartaian atas sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan multi partai. Begitu juga studi-studi yang dilakukan oleh Blondel dan Rokkan, melihat sistem kepartaian dilihat dari segi jumlah. Namun berbeda dengan Duverger, Blondel dan Rokkan menambahkannya dengan melihat segi kompetisi di antara partai-partai yang ada sehingga melahirkan sistem partai dominan dan tidak dominan.

TABEL 1
BERBAGAI TIPE SISTEM KEPARTAIAN¹⁶

Author	Principal Criteria for Classification	Principal Type of Party System Identified
Duverger (1954)	Numbers of parties	One-party system Two-party systems Multiparty systems
Dahl (1966)	Competitiveness of opposition	Strickly competitive Cooperative-competitive Coalescent-competitive Strickly-Coalescent
Blondel (1968)	Numbers of party Relative size of party	Two-party systems Two-and-a-half-party systems Multiparty system with one dominant party Multiparty system without dominant party
Rokkan (1968)	Numbers of party Likelihood of single-party majotities Distribution of minority party strengths	The British-German "1 vs 1 + 1" system The Scandinavian "1 vs 3-4 system Even multiparty systems "1 vs 1 + 1 + 2-3"
Sartori (1976)	Number of party Ideological distance	Two-party systems Moderate pluralism Polarized pluralism Predominant-party systems

¹⁶ Peter Maier, "Party System and Structures of Competition", dalam Lawrence Leduc et.all (eds), *Comparing Democracies: Election and Voting in Global Perspective*, California:Sage Publication,Inc., 1996, hal.86.

Sementara itu, Sartori melihat sistem kepartaian selain berdasarkan jumlah dan kompetisi juga berdasarkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada. Ia menggolongkan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak di antara kutub-kutub itu (polaritas), dan arah perilaku politiknya. Berdasarkan itu, ia lalu mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrim.

Berbeda dengan hal di atas, Huntington mengkaji sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi (pelembagaan). Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya. Dalam bukunya *Political Order in Changing Societies* (1968), Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dan sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.¹⁷

Sistem kepartaian yang kokoh, menurut Huntington, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. *Pertama*, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktixitas politik anomik dan kekerasan. *Kedua*, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat

¹⁷ Manuel Kaisiepo, "Partai Baru atau Sistem Kepartaian Baru". Kompas, 20 September 1994.

yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

Senada dengan Huntington tersebut, Mainwaring juga melihat sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi. Meski berangkat dari konsep yang sama dengan Huntington, ia mengelompokkan sistem kepartaian melihatnya berdasarkan (1) Stabilitas dalam persaingan kepartaian; (2) Mengakarnya parpol dalam masyarakat; (3) Legitimasi atas partai dan pemilu sebagai mekanisme yang sah; dan (4) Struktur organisasi partai yang stabil.

Vicky Randall dan Lars Svendsen membagi sistem kepartaian dalam kerangka pelembagaan partai politik berdasarkan aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Berdasarkan aspek itu ia lalu menyilangkannya dan menghasilkan empat hal, yaitu (1) derajat kesisteman suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural; (2) derajat identitas nilai suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural; (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural; dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.¹⁸

Sedangkan Herbert Kitschelt mengusulkan klasifikasi partai-partai politik dalam kerangka membahas isu sistem kepartaian berdasarkan atas tiga tipe ideal, yaitu partai-partai programatik, karismatik, dan klientelistik. Partai programatik adalah partai yang mendasarkan pekerjaannya pada program partai secara khusus. Partai karismatik ditentukan oleh kepemimpinan seseorang yang karismatik. Dan

¹⁸ Dikutip dari Ramlan Surbakti, "*Perkembangan Partai Politik di Indonesia*", dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 18 tahun 2002, hal.17-18

partai klientelistik adalah partai yang bekerja lebih condong pada kepentingan pribadi, keuntungan partisan, dan jasa untuk klien setia mereka.

TABEL 2
SISTEM KEPARTAIAN BERDASARKAN KELEMBAGAAN PARTAI¹⁹

Penulis	Aspek Pelembagaan partai Politik
Vicky Randall dan Lars Svasand (2002)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktural-internal = Kesisteman ▪ Kulturral-internal = Identitas nilai ▪ Struktural-eksternal=Otonomi Keputusan ▪ Kultulral-eksternal = Citra pada publik
Scott Mainwaring (1999)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilitas dalam persaingan kepartaian ▪ Mengakarnya parpol dalam masyarakat ▪ Legitimasi atas partai dan pemilu ▪ sebagai mekanisme yang sah ▪ Struktur organisasi partai yang stabil
Huntington (1968)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptability ▪ Complexity ▪ Autonomy ▪ Coherence
Herbert Kitschelt (1995)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partai programatik ▪ Partai karismatik ▪ Partai klientelistik

Sumber : Lili Romli, "Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan" dalam *Jurnal Politika*, Vol.2 No.2.2006

¹⁹ Lili Romli, "Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan" *Jurnal Poltika*, Vol 2, No.2,2006,hal.27

Berdasarkan pada pemaparan di atas tentang sistem kepartaian, baik berdasarkan atas jumlah partai, komposisi di antara partai, jarak ideologi, maupun berdasarkan pada pendekatan pelembagaan partai, tampaknya bila hal tersebut digunakan untuk menganalisis tentang sistem kepartaian di Indonesia mengidap sejumlah persoalan. Artinya, pelaksanaan sistem kepartain di Indonesia menghadapi masalah krusial, kecuali yang berkaitan dengan kompetisi antar partai (yang terlihat dalam pemilu).

D. Model Laakso-Taagepera Sistem Kepartaian

Sistem Kepartaian sebagaimana diuraikan sebelumnya diklasifikasi berdasarkan numerologi atau banyaknya partai politik dan ukuran besar kecilnya secara relatif suatu partai. (Duverger, 1954; Almond and Coleman, 1960; Sartori, 1976; McDonald and Ruhl, 1989).

Namun Coppedge (1999) mengembangkan rumusan tolok ukur klasifikasi yang berbeda dengan menggunakan metode ENPV (Effective Number of Parties Voters). Dengan tolok ukur Coppedge yang berdasarkan rumusan ENPP dari Laakso-Taagepera dapat diukur apakah suatu negara bercorak sistem kepartaian dominan, dwi-partai, multipartai moderat atau multipartai ekstrim yaitu dengan mengukur besar kecilnya nilai ENPV dari suatu negara demokrasi.²⁰

Berdasarkan rumusan dan klasifikasi tersebut maka Coppedge (1999) melakukan studi di berbagai negara demokrasi di Amerika Latin, dan menemukan bahwa tiap negara di Amerika Latin memiliki corak sistem kepartaian yang

²⁰ Michael Coppedge, *The Dynamic Diversity of Latin American Party Systems*, Kellogg Institute, Hesburgh Center, University of Notre Dame, 1999. from <http://www.nd.edu/~mcoppedg/crd/ddlaps.htm>

berbeda-beda menurut rumusan Laakso-Taagepera. Hasil temuannya menunjukkan bahwa negara-negara seperti Mexico dan Paraguay menganut sistem partai dominan; Colombia dan Uruguay menganut sistem dwi-partai; Costa Rica, Venezuela, dan mungkin Argentina menganut sistem dua setengah partai; dan Bolivia, Chili dan Ecuador menganut sistem multipartai.

Two-Party ENPV from 2 to 3	Moderate Multi-Party ENPV from 3 to 5	Extreme Multi-Party ENPV above 5
---	--	---

Pengukurannya dengan menghitung nilai ENPV –nya dan ENPP-nya

1.1 **ENPV** (Jumlah Efektif Parpol di Luar Parlemen)

1.2 **ENPP** (Jumlah Efektif Parpol di Dalam Parlemen)

Sedangkan untuk pengukuran nilai ENPV atau ENPP itu sendiri, menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Laakso-Taagepera²¹

$$N_v = \frac{1}{\sum_{i=1}^n v_i^2}$$

N_v : Effective Number of Parties Voters (ENPV)
 v_i : Perolehan suara setiap parpol peserta pemilu dalam persen.

Rumus Laakso dan Taagepera kemudian dimodifikasi menjadi „Jumlah Effektiv Parpol di Parlemen“ -- dari ENP (The Effective Number of Parties) dirubah menjadi ENPP (The Effective Number of Parliamentary Parties). Perolehan Suara yaitu Voice v_i diganti dengan Perolehan Kursi yaitu Seat s_i (dalam persen).

²¹ Laakso and Taagepera, “Effective Number of Parties” *Comparative Political Studies* 12:3-27 dalam Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy*, New Haven: Yale University Press.1999

Rumusnya ²²:

$$\text{ENPP} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n s_i^2} = \frac{1}{(s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + \dots + s_n)}$$

Contoh:

Dengan formula itu, maka untuk sistem kepartaian “dwipartai” atau “dua partai” yang kursinya di parlemen terbagi 50:50 , ENPP-nya akan menghasilkan 2,0 (Tabel I). Dalam sistem keparpolan “catur (empat)-partai” yang perolehan kursinya 25:25:25:25, maka ENPP akan menghasilkan 4,0 (Tabel II). Sementara itu sistem kepartaian “dua-koma-dua-partai” atau dibulatkan “dwi-partai” dengan perolehan kursinya 60:25:10:5, maka ENPP-nya akan menunjukkan 2,23 (Tabel III).

²² Patrick Dumont and Jean-François Caulier: “*The Effective Number of Relevant Parties*”: How Voting Power Improves Laakso-Taagepera’s Index, December 11, 2003, hal. 5; Hermann Schmitt, „Multiple Parteienbindungen; Parteienbindungen der Schweizerinnen und Schweizer im internationalen Vergleich“, Jahreskongress der SVPW in Balsthal, 2-3.11.2000, hal. 12.

TABEL 3
MODEL PERBANDINGAN ENPP

Partai	Perolehan Kursi p	Tabel I	Perolehan Kursi s	Tabel II	Perolehan Kursi p	Tabel III
		si 2		si 2		si 2
A	50	0,25	25	0,0625	60	0,360
B	50	0,25	25	0,0625	25	0,063
C			25	0,0625	10	0,010
D			25	0,0625	5	0,003
Jumlah	100	$\sum si^2 = 0,50$	100	$\sum si^2 = 0,25$	100	$\sum si^2 = 0,435$
NPP		$1/\sum si^2 = 2,0$		$1/\sum si^2 = 4,0$		$1/\sum si^2 = 2,23$

Apabila dilihat pada Tabel II dan Tabel III: yang sama-sama menunjukkan ada 4 partai politik yang duduk di parlemen, namun ENPP pada Tabel III (2,23) lebih rendah ketimbang ENPP pada Tabel II (4,0).

Artinya, jumlah efektif partai politik pada Tabel III lebih rendah dibandingkan pada Tabel II.

E. Model Fragmentasi Indeks-Rae

Mengukur Derajat Fragmentasi dengan Indeks Rae

Untuk mengetahui derajat fragmentasi baik bagi partai-partai di luar maupun di dalam parlemen dapat dilakukan pengukurannya. Yaitu dengan menggunakan ukuran yang dikenal sebagai "Indeks - Rae"²³.

Dalam penelitian ini, dipusatkan pengukurannya pada indeks-rae untuk derajat fragmentasi bagi partai-partai politik di dalam parlemen.

$$\text{Rumusnya}^{24}: F = 1 - \sum_{i=1}^n (s_i)^2 = 1 - 1/ENPP$$

F = adalah indeks Fragmentasi

s = persentase kursi di parlemen

Lewat rumusan ini diketahui, bahwa makin tinggi indeksnya, maka makin luaslah fragmentasinya. Sebenarnya, dengan ukuran ENPP atau jumlah efektif partai politik pun sudah bisa dibaca arah fragmentasinya. Karena kedua model atau rumusan tersebut saling berhubungan.

²³ Rae, Douglas W., "The Political Consequences of Electoral Laws", Yale University Press, New Haven, CT: 1971

²⁴ Jan-Erik Lane and Svante Ersson, "Dimensions of Party Systems", Chapter 5: Party System, London 1987, hal. 4

F. Ketahanan Nasional

1. Pengertian Ketahanan Nasional

Secara etimologis Ketahanan Nasional terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata “tahan” Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “tahan” mengandung arti: Tetap keadaannya (kedudukannya) meskipun mengalami berbagai hal, tidak lekas rusak (berubah, luntur), kuat atau sanggup menderita, dapat menguasai diri, cukup.

Sedangkan kata nasional berasal dari kata “*nation*” yang artinya bangsa. Bila dipadukan maka ketahanan nasional mengandung arti bangsa yang kuat atau sanggup menahan berbagai penderitaan dan tetap utuh. Untuk menjadi bangsa yang kuat diperlukan kesejahteraan dan keamanan.

Berdasarkan rumusan pengertian Ketahanan Nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional yang kemudian diakomodasikan dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Skep/1328/XII/1974, Ketahanan Nasional didefinisikan sebagai :

*”Kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya”.*²⁵

Sementara Wan Usman mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.²⁶ Lebih lanjut dikemukakan bahwa

²⁵ Sunardi, RM., *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Kuanternita Adidarma, Jakarta, 2004, hal. 4-5.

²⁶ Wan Usman, dkk., *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003, hal. 3.

Ketahanan Nasional dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*), keduanya harus berjalan seimbang dimana keamanan dan kesejahteraan mengandung muatan yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis.²⁷

Jadi Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah kekuatan nasional dalam arti yang luas, yang mengandung unsur-unsur kekuatan yang dimiliki bangsa yakni asta-gatra mencakup geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

2. Ketahanan Nasional Sebagai Kondisi

Sebagai kondisi Ketahanan Nasional mengandung anasir-anasir dasar keuletan dan ketangguhan bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal) yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional.

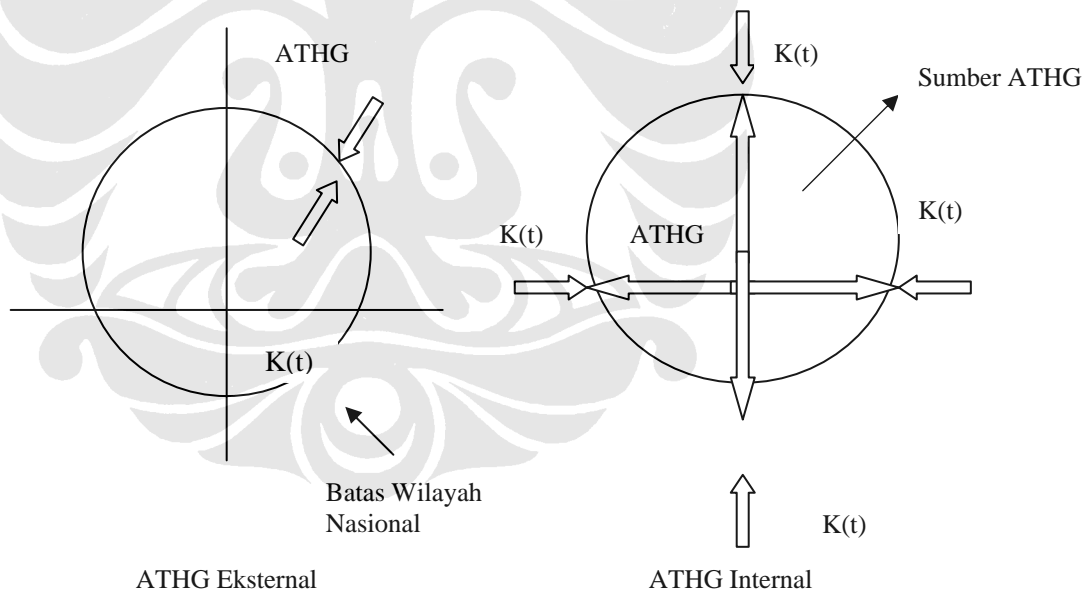
Keuletan dan ketangguhan tersebut merupakan faktor pendukung dalam sistem ketahanan nasional. Misalkan Ketahanan Nasional diberi notasi K, maka untuk menggambarkan kondisinya yang dinamik diperlukan unsur waktu (t) sehingga notasi K yang dinamik adalah K(t). Mengingat dalam perwujudannya, Ketahanan Nasional sangat tergantung pada unsur keuletan yang dinotasikan sebagai U dan ketangguhan yang diberi notasi T, maka dengan menggunakan

²⁷ *Ibid.*, hal 93.

model matematis akan menggambarkan $K(t)$ suatu negara pada waktu tertentu sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$K(t) = U(t) \times T(t)$$

Setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan secara model vektorial akan selalu dipersepsikan sebagai "tekanan" (*pressure*) terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam persepsi yang negatif. Sedangkan dalam persepsi yang positif akan menjadi "tarikan" (*pull*) atas tata kehidupan yang dinamis. Kedua hal itu akan mendapat reaksi dari Ketahanan Nasional yang ada pada saat itu. Reaksi atas "tekanan" dan "tarikan" tersebut dapat digambarkan secara spasial sebagai hasil interaksi vektor sebagai berikut :



Sumber : Sunardi, 2004.

Gambar 3.1 Visualisasi Vektoris $K(t)$ Menghadapi ATHG

Visualisasi Vektoris $K(t)$ sebagaimana pada gambar di atas, cukup mudah diasosiasikan dalam praktek di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada aspek pertahanan keamanan misalnya maka gambar visualisasi vektor ATHG eksternal yang akan menangkal dan menghadapi ancaman dari luar negeri melalui operasi pertahanan sedangkan pada visualisasi vektor ATHG internal merupakan operasi keamanan (*containment*) terhadap gangguan keamanan yang bersumber dari dalam negeri.

Begitu juga pada aspek politik, gambar visualisasi vektor ATHG eksternal merupakan penangkal ancaman dari luar negeri melalui kebijakan politik luar negeri sedangkan visualisasi internal merupakan upaya kebijakan politik dalam negeri dan pembangunan dalam menghadapi kerawanan-kerawanan yang akan mengganggu stabilitas politik dalam negeri demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Menyadari adanya ketidakpastian mengenai segala keadaan yang dihadapi di masa yang akan datang yakni derajat atau intensitas ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, maka sudah semestinya Ketahanan Nasional harus tetap ditingkatkan. Dengan demikian unsur keuletan dan ketangguhan harus dibangun dan dikembangkan secara serasi dan seimbang. Sementara di pihak lain apabila upaya pembangunan nasional ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara secara serasi dan seimbang, maka pada gilirannya kesejahteraan dan keamanan yang mantap akan mendorong terwujudnya peningkatan kondisi Ketahanan Nasional.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan baru dapat

terwujud bila stabilitas keamanan dapat terkendali dan sebaliknya stabilitas keamanan akan terganggu, bila kesejahteraan rakyatnya tidak dapat terpenuhi.

Ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Keduanya harus berjalan seimbang, di mana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yakni partisipasi masyarakat yang demokratis.²⁸ RM. Sunardi menjelaskan “bahwa kondisi nyata tata kehidupan nasional amat kompleks, maka untuk memahami ketahanan suatu bangsa/negara diperlukan dua jenis model, yaitu model makro dan model mikro. Model makro ketahanan nasional ditujukan untuk menganalisis kondisi dinamik tata kehidupan nasional pada lingkup negara, sedangkan model mikro digunakan pada lingkup sub-negara atau sub-nasional”.²⁹

²⁸ Wan Usman. *Ibid.* hal 93

²⁹ RMSunardi. *Op.cit.* hal 18

BAB III

SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA

A. Perkembangan Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia

Munculnya organisasi modern di awal abad kedua puluh yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo dan Serikat Islam dapat disebut sebagai pertanda lahirnya partai pertama di Indonesia. Selanjutnya berdirilah partai-partai politik lain, seperti Partai Komunis Indonesia (1920) yang dipimpin oleh Semaun, Partai Nasional Indonesia (1927) oleh Soekarno, Partai Indonesia (1931), Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO) tahun 1937 yang diketuai oleh Drs. A.K. Gani, Partai Persatuan Indonesia oleh Moh. Yamin sebagai perpecahan dari Gerindo, Partai Indonesia Raya (1931). Di samping partai tersebut, lahir pula organisasi yang menyerupai partai, tetapi tidak menggunakan kata partai, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Perjuangan organisasi tersebut, langsung ataupun tidak langsung, bercita-cita Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, tradisi partai politik di Indonesia dimulai dengan munculnya usul yang diajukan oleh BPKNIP untuk berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada pemerintah. Usul itu menuntut kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat mendirikan partai politik demi mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 3 November 1945 keluarlah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Maka, tumbuhlah partai politik seperti cendawan tumbuh di musim hujan.

Menurut Alfian (1992), partai politik tersebut dapat digolongkan kepada kelompok-kelompok berikut.

- a. Aliran Nasionalis, yaitu PNI, PRN, PIR Hazairin, Parindra, Partai Buruh, SKI, PIR, Wongsonegoro, dan lain-lain
- b. Partai Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, dan Perti.
- c. Aliran Komunis, seperti PKI, SOBSI, dan BTI.
- d. Aliran Sosialis, seperti PSI, GTI, dan lain-lain
- e. Aliran Kristen, seperti Partai Katolik dan Parkindo.

Pengelompokkan itu juga tidak lepas dari kekuatan Jepang yang membagi aliran dalam politik Indonesia kepada :

- (1) golongan nasionalis oportunistis, (2) nasional Islam, dan
- (3) komunis/sosialis.

Partai politik di masa demokrasi liberal pada tahun 1950-an mendapat kesempatan secara bebas untuk masuk kepada pemerintahan, tetapi belum ada partai yang memiliki dukungan rakyat secara mayoritas sehingga konflik-konflik dan pertentangan ideologi mulai memuncak. Setelah pemilu 1955 ditemukan peta kekuatan, yaitu partai beraliran nasionalis (27,6%), beraliran Islam (45,2%), beraliran komunis (15,2%), dan sisanya aliran Kristen dan sosialis. Ekses negatif dari peranan partai politik masa demokrasi liberal adalah melaksanakan programnya, keputusan politik dilakukan melalui perhitungan voting, oposisi menampakkan citra negatif dan iklim kebebasan membuka peluang terbentuknya partai-partai baru.

Partai politik di masa demokrasi terpimpin (Orde Lama) memberikan kesempatan kepada Presiden Soekarno, militer, serta Partai Komunis untuk lebih berkuasa. Hal ini disebabkan oleh kestabilan nasional yang terganggu, sehingga Presiden mengeluarkan pengumuman negara dalam keadaan perang (SOB). Pada pemerintahan Soekarno ada kecenderungan untuk menguburkan partai politik, termasuk PNI yang didirikannya, karena menimbulkan konflik. Besarnya pengaruh Soekarno menyebabkan partai politik tidak berdaya. Akan tetapi, demokrasi terpimpin yang dilaksanakan ternyata hanya ada terpinpinnya saja, sedangkan demokrasinya hilang. Ada kecenderungan! demokrasi terpimpin mencoba membawa seluruh bangsa bergerak dengan satu nada dalam drama revolusi, satu nafas dalam menentukan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Soekarno mengurangi kekuatan yang menghambat cita-citanya dengan memenjarakan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh

Kegagalan pemberontakan G30S/PKI telah mengakhiri sistem demokrasi terpimpin. Orde Baru melakukan pembaharuan politik. Pemilu 1971 membentuk peta politik (9 partai politik dan satu Golkar), yaitu Golkar (62,8%), NU (18,67%), Parmusi (7,36%) PNI (6,94%), PSII (2,39%), Parkindo (1,34%), Katolik (1,11 %), dan Perti (0,7%). Orde baru cenderung memisahkan politik dengan ekonomi, keterlibatan ABRI dalam politik erat kaitannya dengan “dwifungsi” di mana peranan kaum sipil kurang mampu mengatasi krisis, Golkar, merupakan kepanjangan tangan militer di lembaga sipil, sehingga kedudukan partai politik semakin terdesak. Disamping itu, Golkar dengan dukungan militer memobilisasi organisasi fungsional masyarakat untuk mendukungnya, sehingga semakin

melemahnya posisi partai politik. Semenjak pemilu 1977 partai politik disederhanakan menjadi dua (PPP dan PDI) dan Golkar.

Golkar, kemudian pada pemilu 1987 semua partai harus berasaskan Pancasila, sehingga PPP yang beraliran Islam ditinggalkan banyak pendukung tradisionalnya, sedangkan kelompok kritis yang menghendaki pembaharuan politik mulai mendukung PDI.

Partai politik di masa reformasi 1998 telah membuka peluang masyarakat mendirikan partai, sehingga menghadapi Pemilu 1999 hadir partai politik sebanyak 48 partai, tetapi tidak satu pun mencapai kursi mayoritas, di antara lima besar adalah PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Suatu hal masih belum berubah dalam budaya politik Indonesia adalah masih kuatnya budaya politik primordial, masyarakat masih mengantungkan aspirasi politiknya kepada tokoh kharismatik, sehingga alam kebebasan belum dapat membuka jalan ke arah demokratisasi (Hermawan Sulistyono, 1999).

Pada tahun 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru Partai Demokrat, bernama Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai tokoh pembaharu menjadi saingan yang hebat bagi calon lainnya Megawati. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai tokoh baru yang menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Kampanye perubahan SBY berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Partai Demokrat berhasil masuk 7 besar pemenang pemilu legislatif tahun 2004, yang diikuti kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan presiden secara langsung.

B. Perkembangan Beberapa Sistem Kepartaian di Dunia

Di berbagai belahan bumi, berbagai perkembangan politik dan budaya membentuk berbagai tipe partai yang berbeda, yang sesuai dengan sistem pemerintahan dan sistem pemilu, dan memiliki penampakan yang khas (sesuai dengan karakteristiknya). Pengenalan terhadap fungsi dan keberadaan partai itu sendiri memiliki peran/arti yang besar terhadap perencanaan strategis.

Di Eropa, partai-partai yang mendominasi adalah yang memiliki latar belakang ideologis. Mereka setidaknya membatasi dirinya secara politis dari lawan-lawan politiknya. Program yang mereka tawarkan seringkali menjadi pusat perhatian pada saat pemilu. Sebuah pengecualian ditunjukkan oleh sistem presidensial yang berlaku di Perancis, dan pada saat ini, juga di Rusia. Di negara-negara ini, justru muncul gerakan-gerakan politik yang menghilangkan profil politik yang jelas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di Eropa, perhatian masyarakat terhadap figur individu terus meningkat dibandingkan dengan program.

Di Amerika Latin, perkembangan partai menempuh jalan yang berbeda. Setelah berpisahya gerakan politik di "*Serviles*" dan "*Liberales*", berdasarkan kesepakatan dengan sistem pemerintahan yang presidensiil, dibentuklah berbagai partai. Partaipartai ini tidak terlalu berorientasi pada program seperti partai-partai di Eropa. Partaipartai ini lebih memiliki karakteristik gerakan seringkali dipimpin oleh seorang "*Caudillo*" dan menempatkan individu sebagai titik pusat perselisihan. Hal ini pula yang memicu munculnya pernyataan-pernyataan populis

(di mana para pemimpin menerapkan politik yang dekat dengan rakyat). Sebagai tendensi dapat disimpulkan di sini bahwa dibandingkan sosok individu (figur), program mengalami peningkatan.

Di Amerika Utara, yakni di Amerika Serikat dan Kanada terbentuk sistem-sistem yang berbeda. Dalam sistem dua partai menyangkut partai massa, bila ditinjau dari programnya, Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan presidensiilnya nyaris tidak memiliki perbedaan dan secara umum ditandai oleh kandidatnya. Tidak ada struktur yang jelas dan yang disusun hingga tingkat lokal. Sebaliknya, partai-partai yang ada di Kanada dibangun berdasarkan perbedaan ideologis, dan terutama perbedaan bahasa, yang juga dapat dinilai sebagai partai minat.

Di sebagian besar negara-negara di Afrika muncul berbagai partai yang dapat disebut sebagai partai minat dengan latar belakang kesukuan. Pada masa lalu, partai yang ada pernah mengarah ke sebuah sistem partai tunggal dengan aliran sosialis, yang pada intinya tidak sungguh-sungguh mengarah kepada paham sosialis itu sendiri. Setelah sistem partai tunggal dibubarkan, partai-partai kesukuanlah yang mengurus kegiatankegiatan harian.

Di Asia Tenggara dan Asia Selatan, partai-partai regional dan keluarga memiliki arti yang khusus, sementara partai-partai ideologis terbentuk dari "sisi kiri". Bisa dipastikan bahwa akan ada penambahan jumlah partai yang berorientasi keagamaan (religius).

Meskipun dalam ruang lingkup Arab-Muslim terbentuk sistem partai yang pluralis, partai-partai ini pun berorientasikan keagamaan, namun sebagian besar dengan latarbelakang keluarga/suku.

C. Perkembangan Pemilu di Indonesia

Dalam sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah diselenggarakan sembilan kali Pemilu, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004:

1. Pemilu 1955

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Tahap pertama, Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, Tahap kedua, Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Sebagai pemenangnya adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

2 . Pemilu 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama pada era Orde Baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Sebagai pemenangnya adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

3 . Pemilu Orde Baru (1977-1997)

Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dan seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

4 . Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilihan umum pertama yang berasas persaingan terbuka (competitive elections). Pemilu 1999 merupakan Pemilu pertama setelah

berakhirnya era Orde Baru, diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 1999 Sebagai pemenangnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (sedangkan Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR (Hermawan Sulisty, 1999).

5 . Pemilihan Umum 2004

Pemilihan Umum Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya pun berbeda dari Pemilu sebelumnya. Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999). Dalam Pemilu yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah (Oka Mahendra & Soekedy, 2004).

6 . Pentahapan Pemilu 2004

Pemilu 2004 terbagi menjadi maksimal tiga tahap dan minimal dua tahap, yaitu : Tahap pertama (Pemilu legislatif), Pemilu untuk memilih partai politik (untuk persyaratan Pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004. Tahap kedua (Pemilu presiden putaran pertama), untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap ketiga (Pemilu presiden putaran kedua), babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 persen.

Pemilu Legislatif 2004

Pemilu legislatif merupakan tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Tujuannya untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan Pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya.

a. Peserta Pemilu Legislatif 2004

Peserta pemilu legislatif pada Pemilu 2004 berjumlah 24 partai politik, yaitu:

- (1) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme,
- (2) Partai Buruh Sosial Demokrat,
- (3) Partai Bulan Bintang,
- (4) Partai Merdeka,
- (5) Partai Persatuan Pembangunan,
- (6) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan,
- (7) Partai Perhimpunan Indonesia Baru,
- (8) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan,
- (9) Partai Demokrat,
- (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia,
- (11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia,
- (12) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia,
- (13) Partai Amanat Nasional,
- (14) Partai Karya Peduli Bangsa,
- (15) Partai Kebangkitan Bangsa,
- (16) Partai Keadilan Sejahtera,
- (17) Partai Bintang Reformasi,
- (18) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
- (19) Partai Damai Sejahtera,
- (20) Partai Golongan Karya,
- (21) Partai Patriot Pancasila,
- (22) Partai Sarikat Indonesia,
- (23) Partai Persatuan Daerah,
- (24) Partai Pelopor.

D. Hasil Pemilu DPR 1999

TABEL 4
HASIL PEMILU DPR 1999

Pemilu DPR 1999			
No.	Nama Partai	Kursi	% Kursi
1.	PDIP	153	33,12%
2.	Golkar	120	25,97%
3.	PPP	58	12,55%
4.	PKB	51	11,04%
5.	PAN	34	7,36%
6.	PBB	13	2,81%
7.	Partai Keadilan	7	1,52%
8.	PKP	4	0,87%
9.	PNU	5	1,08%
10.	PDKB	5	1,08%
11.	PBI	1	0,22%
12.	PDI	2	0,43%
13.	PP	1	0,22%
14.	PDR	1	0,22%
15.	PSII	1	0,22%
16.	PNI Front Marhaenis	1	0,22%
17.	PNI Massa Marhaen	1	0,22%
18.	IPKI	1	0,22%
19.	PKU	1	0,22%
20.	Masyumi	1	0,22%
21.	PKD	1	0,22%
22.	PNI Supeni		
23.	Krisna		
24.	Partai KAMI		
25.	PUI		
26.	PAY		
27.	Partai Republik		
28.	Partai MKGR		
29.	PIB		
30.	Partai SUNI		
31.	PCD		
32.	PSII 1905		
33.	Masyumi Baru		
34.	PNBI		

35.	PUDI		
36.	PBN		
37.	PKM		
38.	PND		
39.	PADI		
40.	PRD		
41.	PPI		
42.	PID		
43.	Murba		
44.	SPSI		
45.	PUMI		
46.	PSP		
47.	PARI		
48.	PILAR		
Jumlah		462	100,00%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, KPU

Pada tahun 1999, sesuai agenda reformasi politik yang ditawarkan pemerintah diadakan pemilu untuk memilih DPR baru, yang lebih representatif dibanding DPR sebelumnya. Pada pemilu 1999, kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak-hak politiknya semakin meningkat. Berbagai perbaikan politik yang dilakukan pemerintah, khususnya adanya kebebasan dan keterbukaan dalam menyalurkan aspirasi politik, dapat merangsang antusiasme masyarakat dalam berperilaku politik. Dalam konteks perubahan di atas, pemilu 1999 merupakan medan yang benar-benar baru, baik bagi partai politik lama maupun partai politik baru. Partai-partai non pemerintah berhasil mendulang suara cukup signifikan dan mampu menguasai DPR, seperti PDIP, PKB, PAN, PBB, PK, dan sebagainya. Golkar justru mengalami nasib yang lebih mengenaskan dan jauh lebih parah dari PPP. Pemilu 1999 merupakan saksi sejarah bagi runtuhnya hegemoni politik Golkar. Penurunan suara Golkar pada Pemilu 1999 setidaknya disumbang oleh penarikan dukungan TNI, netralitas TNI inilah yang menjadi pukulan mematikan bagi Golkar.

E. Hasil Pemilu DPR 2004

Secara keseluruhan hasil Pemilu legislatif atau DPR pada Pemilu 2004 dapat dipaparkan sebagai berikut:

TABEL 5
HASIL PEMILU DPR 2004

Nomor	Nama Partai Politik	Jumlah	P	Jrsi
1.	PNI Marhaenisme	923.159	0,81%	1
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56%	0
3.	Partai Bulan Bintang	2.970.4	2,62%	11
4.	Partai Merdeka	842.541	0,74%	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.7	8,15%	58
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.6	1,16%	5
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59%	0
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.4	1,08%	1
9.	Partai Demokrat	8.455.2	7,45%	57
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.2	1,26%	1
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75%	1
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79%	0
13.	Partai Amanat Nasional	7.303.3	6,44%	52
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.2	2,11%	2
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.	10,57%	52
16.	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.0	7,34%	45
17.	Partai Bintang Reformasi	2.764.9	2,44%	13
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.	18,53%	109
19.	Partai Damai Sejahtera	2.414.2	2,13%	12
20.	Partai Golongan Karya	24.480.	21,58%	128
21.	Partai Patrbt Pancasila	1.073.1	0,95%	0
22.	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60%	0
23.	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58%	0
24.	Partai Pelopor	878.932	0,77%	2
JUMLAH SUARA SAH		113.462	100,00%	550

umber: Komisi Pemilihan Umum, KPU

Jumlah suara yang tidak sah, yaitu sebanyak 10 juta suara (8,81%) dari total jumlah pemilih, yaitu sebanyak 124.420.339 jiwa.

Selain itu, terdapat calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput), yaitu sebanyak 24 juta calon pemilih (15,93%) dari total jumlah calon pemilih, yaitu sebesar 148 juta penduduk.